



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 12 Agustus 2026

Nomor : B/900/1032/BKAD-SET/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Penilaian Kesesuaian
Rancangan KUA PPAS Dengan
KEM PPKF Tahun 2027
Kabupaten/Kota

Yth. 1. Wali Kota Batam
2. Bupati Kepulauan Anambas
3. Bupati Karimun

di
Tempat

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Gubernur telah melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA PPAS Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2027 dengan KEM PPKF Tahun 2027.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil penilaian dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian kesesuaian ini, Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA PPAS yang sedang dilakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hal rancangan KUA PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan memperhatikan program-program daerah yang selaras dengan program prioritas nasional.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Sekretaris Daerah,



Misni

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Prov Kepri
Nomor : B/900/1032/BKAD-SET/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS Tahun 2027 Kota Batam

Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan Rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud dilakukan minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF.

Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD, yang juga disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima.

Secara teknis ketentuan tentang tata cara penilaian di atas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut adalah ringkasan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk **Kota Batam**, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

- A. Target Makro:
 - a. Target Pertumbuhan Ekonomi : SELARAS
- B. Arah Kebijakan Fiskal dan Program Prioritas Nasional
 - a. Nilai Indeks Sinfis/Indeks 3 : 91,09%
- C. Belanja Wajib
 - a. Belanja Wajib Pendidikan : MEMENUHI
 - b. BIPP : BELUM MEMENUHI
 - c. Belanja Wajib Pegawai : BELUM MEMENUHI

Secara lengkap berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk **Kota Batam** sesuai lampiran.

a.n. Gubernur Kepulauan Riau
Sekretaris Daerah,



Misni

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2027

Kode Satker : 990523
 Nama Pemda : Kota Batam
 Verifikator : Provinsi Kepulauan Riau

A. Target Makro

Uraian	Nilai Target	Nilai Input	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	7.4-8,66	7,70	Pemerintah Kota Batam dalam Rancangan KUA PPAS TA. 2027 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,70–7,70%. Target tersebut belum sepenuhnya selaras dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebesar 7,40–8,66%, khususnya pada batas bawah target yang masih berada di bawah target minimum yang ditetapkan. Selain itu, terdapat perbedaan target pertumbuhan ekonomi antara dokumen RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA PPAS Tahun 2027 yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah Kota Batam perlu memastikan konsistensi target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta melakukan optimalisasi program dan kegiatan strategis yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor unggulan daerah. Pengendalian terhadap pencapaian indikator tersebut juga perlu diperkuat agar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal dan mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Keterangan
1. Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan keselarasan dengan indikator Strategi Kewilayahan Pertumbuhan Ekonomi dalam KEM PPKF Tahun 2027 melalui kebijakan penguatan daya saing pelaku usaha, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM, fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM, optimalisasi penerimaan daerah melalui penguatan kanal pembayaran pajak, serta sinergi pendanaan pusat dan daerah dalam mendukung konektivitas. Namun demikian, Pemerintah Kota Batam agar mempertimbangkan pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pinjaman konsesional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, sebagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas daerah.
2. Penurunan Kemiskinan	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan keselarasan dengan indikator Strategi Kewilayahan Penurunan Kemiskinan dalam KEM PPKF Tahun 2027 melalui pemberian bantuan sosial dan subsidi sembako untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan kompetensi dan kapasitas UMK, pemberian subsidi bunga pinjaman 0% bagi usaha mikro, serta fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM.

	Selanjutnya, Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem deteksi dini terhadap rumah tangga rentan miskin, pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang mampu meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan, serta optimalisasi KD/KMP dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Selain itu, peningkatan kompetensi UMK agar diarahkan pada kebutuhan industri dan pasar kerja untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Pendidikan	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan keselarasan dengan indikator Strategi Kewilayahan bidang Pendidikan dalam KEM PPKF Tahun 2027, khususnya melalui pengalokasian belanja untuk pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pemberian dukungan kepada peserta didik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Batam agar memperkuat perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data untuk meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Selain itu, perlu dipertimbangkan optimalisasi sinergi pendanaan pusat dan daerah serta pemanfaatan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung keberlanjutan kualitas layanan pendidikan, serta penguatan keterkaitan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri guna meningkatkan penyerapan lulusan.
4. Kesehatan	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan upaya dalam mendukung indikator Strategi Kewilayahan bidang Kesehatan melalui pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang mendukung pemerataan dan penguatan layanan kesehatan. Namun demikian, narasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan kebijakan dan program kesehatan dengan seluruh indikator yang ditetapkan dalam KEM PPKF Tahun 2027. Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan bidang kesehatan dengan meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada intervensi penanganan stunting, khususnya pada aspek lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. Selain itu, perlu dioptimalkan pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan serta dipertimbangkan pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskal daerah untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Pertanian	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan upaya yang mendukung indikator Strategi Kewilayahan bidang Pertanian/Pangan dalam KEM PPKF Tahun 2027 melalui pengadaan cadangan pangan, pemberdayaan pelaku usaha pertanian dan perikanan, serta pemanfaatan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan peningkatan moda transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi. Selanjutnya, Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan penyediaan dan penyaluran pangan yang secara langsung mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, perlu mempertimbangkan kebijakan tarif PBB-P2 yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan serta mengarahkan pemanfaatan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang secara spesifik mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan.
6. Perikanan	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan upaya yang mendukung peningkatan produksi perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil serta sarana pembudidayaan ikan. Namun demikian, narasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan dukungan terhadap seluruh indikator Strategi Kewilayahan bidang Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam KEM PPKF Tahun 2027.

	Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan perikanan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta peningkatan pendapatan dan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, perlu diperkuat tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan serta dioptimalkan sinergi pendanaan dan akses terhadap skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan.
--	---

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Stunting	46%	Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran intervensi spesifik lebih optimal dibandingkan dengan sensitif. Meskipun demikian, pada intervensi spesifik perlu ditingkatkan alokasi khususnya pada kegiatan Ibu Menyusui. Adapun pada intervensi sensitif yang perlu diperhatikan khususnya pada kegiatan Lingkungan Rumah Tangga dan Infeksi Klinis dan Non Klinis.
Indeks 1	0.00%	
Indeks 2	0.00%	
Indeks 3	91.09%	

D. Mandatory Spending

Uraian	KUA (2027)	Persen KUA	Keterangan
Mandatory Spending			
Pendidikan	1.281.856.916.857,0	27.58%	Alokasi belanja pendidikan pada rancangan KUA PPAS Kota Batam telah memenuhi ambang batas 20% sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Infrastruktur	1.743.419.973.884,52	37.51%	Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik pada rancangan KUA PPAS Kota Batam masih memerlukan optimalisasi dan realokasi anggaran agar target kewajiban 40% dapat tercapai.
Belanja Pegawai	1.859.797.256.756,9998	36.48%	Struktur alokasi belanja pegawai pada rancangan KUA PPAS Kota Batam masih membutuhkan konsolidasi dan pengendalian secara bertahap agar dapat ditransisikan menuju batas maksimal 30% dari total belanja daerah.
PDRD			

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasaan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
1. Pertumbuhan Ekonomi	- Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Dinamika Bisnis dan Sistem Keuangan - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah; - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas	none	1. Dalam rangka Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Dinamika Bisnis dan Sistem Keuangan, Kota Batam mengalokasikan anggaran untuk Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Penningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil/Pelaku Usaha serta Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM (Halaman 43) 2. Dalam rangka Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kota Batam akan berupaua mengoptimalkan penerimaan pendapatan dengan anara lain Melakukan perluasan kerja sama kemitraan dengan lembaga perbankan dan penyedia jasa keuangan untuk menyediakan kanal pembayaran pajak daerah yang multi-platform, inklusif, dan real-time guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak. (halaman 47) 3. Terkait dengan Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas, pemerintah Kota Batam selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau, agar pembangunan untuk mendukung konektivitas yang besumber dari TKDD dapat optimal. (Halaman 47)	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan keselarasan dengan indikator Strategi Kewilayahan Pertumbuhan Ekonomi dalam KEM PPKF Tahun 2027 melalui kebijakan penguatan daya saing pelaku usaha, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM, fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM, optimalisasi penerimaan daerah melalui penguatan kanal pembayaran pajak, serta sinergi pendanaan pusat dan daerah dalam mendukung konektivitas. Namun demikian, Pemerintah Kota Batam agar mempertimbangkan pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pinjaman konsesional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, sebagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas daerah.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
2. Penurunan Kemiskinan	• Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik, (2) belanja yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran (seperti padat karya produktif, cash for work, serta program training berbasis industri untuk memperluas lapangan pekerjaan dan skill pekerja) • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan • Dukungan kemudahan perizinan usaha, pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM • Dukungan optimalisasi KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan	none	1. Terkait dengan penurunan kemiskinan, Pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan anggaran untuk antara lain: Pemberian bantuan sosial kepada Lansia ber-KTP Batam dan Pemberian subsidi sembako dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam (Halaman 42), Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha. (Halaman 43), Pemberian pinjaman konsesional, serta fleksibilitas kredit UMKM, Pemeintah Kota Batam telah mengalokasikan anggaran Pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam. (Halaman 42), serta Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM. (Halaman 43)	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan keselarasan dengan indikator Strategi Kewilayahan Penurunan Kemiskinan dalam KEM PPKF Tahun 2027 melalui pemberian bantuan sosial dan subsidi sembako untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan kompetensi dan kapasitas UMK, pemberian subsidi bunga pinjaman 0% bagi usaha mikro, serta fasilitasi perizinan berusaha bagi UMKM. Selanjutnya, Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem deteksi dini terhadap rumah tangga rentan miskin, pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang mampu meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan, serta optimalisasi KD/KMP dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Selain itu, peningkatan kompetensi UMK agar diarahkan pada kebutuhan industri dan pasar kerja untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Pendidikan	• Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan.	none	1. Dalam hal pendidikan, Pemerintah Kota Batam telah memprioritaskan pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan melalui antara lain : Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan, Pemberian beasiswa/bantuan kepada siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta, Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan keselarasan dengan indikator Strategi Kewilayahan bidang Pendidikan dalam KEM PPKF Tahun 2027, khususnya melalui pengalokasian belanja untuk pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pemberian dukungan kepada peserta didik, serta peningkatan sarana dan

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
	• Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah. • Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri.		negeri dan swasta, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel, pengadaan peralatan Pendidikan, dan Pemenuhan mandatory spending bidang Pendidikan (Halaman 44)	prasarana pendidikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Batam agar memperkuat perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data untuk meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Selain itu, perlu dipertimbangkan optimalisasi sinergi pendanaan pusat dan daerah serta pemanfaatan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung keberlanjutan kualitas layanan pendidikan, serta penguatan keterkaitan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri guna meningkatkan penyerapan lulusan.
4. Kesehatan	• Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.	none	Di bidang Kesehatan, pemerintah kota batam telah memprioritaskan pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui antara lain: Pemenuhan target Universal Health Coverage dan Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. (Halaman 44)	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan upaya dalam mendukung indikator Strategi Kewilayahan bidang Kesehatan melalui pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang mendukung pemerataan dan penguatan layanan kesehatan. Namun demikian, narasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan kebijakan dan program kesehatan dengan seluruh indikator yang ditetapkan dalam KEM PPKF Tahun 2027. Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan bidang kesehatan dengan meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada intervensi penanganan stunting, khususnya pada aspek lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. Selain itu, perlu dioptimalkan pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk mendukung peningkatan kualitas layanan

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
	Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan			kesehatan serta dipertimbangkan pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskal daerah untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Pertanian	- Belanja daerah untuk mendukung penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. - Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan	none	Terkait dengan pertanian, Pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan kebijakan belanja melalui antara lain: Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian, Pengadaan Cadangan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani, Pembangunan dan peningkatan jalan dan penyediaan anggaran yang bersumber dari Opsen PKB yang digunakan antara lain untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi untuk mendukung konektivitas ekonomi (Halaman 42 dan 45)	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan upaya yang mendukung indikator Strategi Kewilayahan bidang Pertanian/Pangan dalam KEM PPKF Tahun 2027 melalui pengadaan cadangan pangan, pemberdayaan pelaku usaha pertanian dan perikanan, serta pemanfaatan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan peningkatan moda transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi. Selanjutnya, Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan penyediaan dan penyaluran pangan yang secara langsung mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, perlu mempertimbangkan kebijakan tarif PBB-P2 yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan serta mengarahkan pemanfaatan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang secara spesifik mendukung konektivitas produksi dan distribusi pangan.
6. Perikanan	- Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan	none	Dalam rangka mendukung perikanan, Pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan belanja untuk antara lain Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil serta Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Batam telah menunjukkan upaya yang mendukung peningkatan produksi perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil serta sarana pembudidayaan ikan. Namun demikian, narasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan dukungan terhadap seluruh indikator Strategi Kewilayahan bidang Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam KEM PPKF Tahun 2027.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
	• Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. • Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan			Pemerintah Kota Batam agar memperkuat kebijakan perikanan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta peningkatan pendapatan dan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, perlu diperkuat tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan serta dioptimalkan sinergi pendanaan dan akses terhadap skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan.

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indikator Stunting

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi Stunting	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Skor Indeks 1			0.00%

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Daerah	0	0	0
Pusat	0	0	0
Deviasi			0.00%
Skor Indeks 2			0.00%

Indeks 3: Budget Optimizer

Intervensi	Aktual	Ideal	Deviasi
Sensitif	58.25%	59.06%	-1.38%
Spesifik	41.75%	40.94%	1.98%
Skor Indeks 3			91.09%

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
45,54%	Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran intervensi spesifik lebih optimal dibandingkan dengan sensitif. Meskipun demikian, pada intervensi spesifik perlu ditingkatkan alokasi khususnya pada kegiatan Ibu Menyusui. Adapun pada intervensi sensitif yang perlu diperhatikan khususnya pada kegiatan Lingkungan Rumah Tangga dan Infeksi Klinis dan Non Klinis.

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	KUA	Total Belanja	Persen KUA	Batasan	Catatan
Pendidikan	1.281.856.916.857	4.648.340.409.000	27,58%	Minimal 20%	Alokasi belanja pendidikan pada rancangan KUA PPAS Kota Batam telah memenuhi ambang batas 20% sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Infrastruktur	1.743.419.973.885	4.648.340.409.000	37,51%	Minimal 40%	Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik pada rancangan KUA PPAS Kota Batam masih memerlukan optimalisasi dan realokasi anggaran agar target kewajiban 40% dapat tercapai.
Belanja Pegawai	1.859.797.256.757	4.648.340.409.000	36,48%	Maksimal 30%	Struktur alokasi belanja pegawai pada rancangan KUA PPAS Kota Batam masih membutuhkan konsolidasi dan pengendalian secara bertahap agar dapat ditransisikan menuju batas maksimal 30% dari total belanja daerah.

PDRD

Jenis	KUA	Total Pendapatan	Nilai Minimal KUA	Persen KUA	Batasan	Catatan
Belum ada data.						